

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Anggota Dewan Terdaftar Terima Bansos

JAKARTA-Fraksi PDIP DPRD DKI kaget melihat nama anggotanya masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos) terkait wabah virus Corona. PDIP melihat masuknya anggota DPRD ke daftar penerima bansos karena data Pemprov DKI kacau.

"Ini bukti data penerima bansos yang amburadul," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono, di Jakarta, Rabu (22/4/2020). Nama anggota Fraksi PDIP DPRD DKI yang masuk daftar penerima bansos adalah Jhonny Simanjuntak. Data itu merupakan daftar penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Tentu saja anggota Dewan bukan termasuk orang yang kurang mampu sehingga perlu menerima bansos.

"Ini Jhonny Simanjuntak SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Istrinya adalah seorang Kepala Sekolah SMP Negeri (ASN). Lha, kok terdaftar sebagai penerima bansos? Jangan-jangan yang seperti ini banyak," kata Gembong, heran dan menduga-duga. Besok, bansos tersebut rencananya akan dibagikan. Dia memastikan Jhonny, yang merupakan anggotanya, tidak akan menerima bansos tersebut. Dia mengkritik kualitas pendataan yang dibikin oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Bansos ini harus benar-benar diterima oleh orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kualitas data menjadi hal yang sangat penting," kata Gembong sambil memperlihatkan data penerima bansos. Agar bansos tidak salah sasaran lebih jauh, Gembong menyarankan Pemprov DKI segera memperbaikinya. "Harus dilakukan evaluasi, cek yang cermat," kata Gembong.

Sementara itu Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menyayangkan proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerimaan bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Itu cara pendataannya bagaimana, kelihatan asal-asalan. Artinya, dari nama saya saja sudah jelas (pendataan bermasalah)," ungkap Jhonny. Dirinya mengakui, namanya ada dalam daftar penerima bansos tersebut.

Seperti diketahui, selama pelaksanaan PSBB untuk menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19), Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial kepada 1,2 juta warga miskin dan rentan miskin yang ter-

dampak pandemi.

Penyaluran bantuan ini sudah berlangsung sejak tanggal 9 April dan rencananya akan disalurkan setiap hari hingga 24 April 2020. Total bantuan sosial per KK itu senilai Rp149.500 dan sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.

Evaluasi Menyeluruh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI. Namun, dalam Kepgub ini tercatat ada PNS dan TNI aktif yang berhak menerima bansos.

"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

PNS tercatat pada Nomor 18 dengan Nomor KK 3,17205E+15 Jl Tongkol No 4, RT/RW 9/1, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. PNS atas nama Suswanto memiliki 4 anggota keluarga. Sementara TNI tercatat pada Nomor 52 dengan Nomor KK 3,17205E+15 KP Japat No 4, RT/RW 3/1, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. TNI atas nama Untung memiliki 3 anggota keluarga.

Menurut Mujiyono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos itu. Pihak swasta itu berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak. Sehingga, masyarakat diminta bersabar karena pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran.

"Informasi dari Pasar Jaya, mer-

eka telah melibatkan retail besar, seperti Lotte Mart, Hypermart dan Transmart. Pihak swasta ini diminta menyuplai bansos senilai yang sama dengan Pasar Jaya untuk tanggal-tanggal tertentu," katanya.

Dari data yang diterimanya, bansos yang dipasok dari pihak swasta ini hampir separuh pasokan bansos yang dibutuhkan penerima sesuai Kepgub, yakni 1,194 juta kepala keluarga. Dia membeberkan, untuk Lottemart akan memasok hingga 175 ribu paket, Hypermart 110 ribu paket, dan Transmart 252 ribu paket bansos. Total pasokan bansos dari retail swasta ini mencapai 537.000 paket.

"Mungkin mekanismenya beli langsung. Swasta menyediakan paket sesuai pesanan, isi komoditasnya sama, nilainya juga sama sekitar Rp 600.000. Nanti pasar jaya yang membelinya sesuai alokasi bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Di sisi lain, tegasnya, Perumda Pasar Jaya juga menyediakan 598.000 paket bansos yang dikemas sendiri. Pengemasan bansos itu dilakukan di Jakgrosir induk di Pasar Induk Kramat Jati, lalu Jakgrosir Kedoya, Jakgrosir walang baru, gedung baru pasar rumput dan gedung JIEP.

"Selama PSBB ini, pendistribusian bansos harus dievaluasi menyeluruh. Karena penjadwalan banyak yang berubah, ada yang mundur hingga empat hari. Kasian masyarakat, mer-

eka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.

Selain berisi daftar nama dan data 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 149.500 per paket sampai ke petunjuk teknis penyaluran bansos tersebut dan verifikasi penerima bansos.

Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.

Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.

Mungkin Pensiunan

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menanggapi adanya unsur PNS dan TNI sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI Jakarta. Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu itu menduga, dua golongan tersebut kemungkinan pensiunan yang didata sebagai penerima bansos DKI.

"Ketimbang satu orang (PNS dan TNI), coba cek itu mungkin sudah

pensiun mereka. Jangan yang satu dipermasalahkan, tapi yang sejuta (penerima bansos) bagus, enggak dilihat," ujar Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Rabu (22/4/2020).

Taufik mengatakan, bansos harus tetap berjalan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dimulai dari Jumat (10/4/2020) sampai Kamis (23/4/2020) mendatang. "Saya kira DKI harus prepare (mempersiapkan) untuk waktu yang panjang, misalkan sampai bulan apa untuk bansos. Kalau nanti pelaksanaannya ternyata jauh lebih cepat, ya lebih bagus," kata Taufik.

Menurutnya, penyaluran bansos merupakan salah satu bentuk kepedulian DKI kepada warganya. Terutama, yang perekonomiannya terkena imbas pandemi virus Corona. "Mereka memang harus dibantu, sejauh ini penyerahan bantuan sudah betul," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 386 Nomor 2020. Keputusan Gubernur itu tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Namun, dalam Kepgub ini tercatat ada nama PNS dan TNI aktif yang berhak menerima bansos. (dnl)